

PENGUATAN CIVIC VIRTUE PADA PEMBELAJARAN PPKn DALAM RANGKA MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0

Wiwin Winarningsih, Vina Lestari, Retno Wardani, Muhammad Mona Adha
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
Windningsih@gmail.com

ABSTRAK

Society 5.0 merupakan masa pembaharuan yang menjadikan manusia sebagai komponen utama di dalamnya. Oleh karena itu, pada masa ini manusia dituntut untuk dapat menjadi problem solver bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mempunyai pengetahuan dan sikap yang baik, kemampuan berpikir kritis serta mampu berinovasi dan berkeaktivitas. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan *civic virtue* pada pembelajaran PPKn dalam rangka menghadapi *era society 5.0*. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka. Hasil dari artikel ini membahas mengenai pembelajaran PPKn, *civic virtue*, *era society 5.0* serta pentingnya penguatan *civic virtue* pada pembelajaran PPKn dalam menghadapi *era society 5.0*. Pembahasan di dalam artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan *civic virtue* pada pembelajaran PPKn penting untuk dilakukan karena elemen-elemen yang terdapat di dalam komponen pembelajaran dapat dijadikan dasar sebagai bekal untuk menghadapi tantangan dan kemajuan zaman termasuk pada *era Society 5.0* saat ini. Membentuk warga negara muda menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter memperkuat keharmonisan dan kolaborasi antar warga di *era society 5.0*.

Kata Kunci: *Civic Virtue, Pembelajaran PPKn, Era Society 5.0*

Pendahuluan

Perkembangan zaman dan teknologi berjalan begitu pesat. Dimulai dari era revolusi industry 1.0 hingga era revolusi industry 4.0 yang serba digital, kemudian saat ini di susul kembali dengan hadirnya *era society 5.0*. Kemajuan tersebut tentu saja menuntut masyarakat dunia untuk terus berkembang dan menggali segala potensi dirinya agar mampu berjalan beriringan dengan teknologi. Teknologi merupakan salah satu bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang terjadi dalam dunia pendidikan [1]. Oleh karena itu, melalui pendidikanlah teknologi tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Keberhasilan tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh proses pelaksanaan pembelajarannya. Karena pembelajaran merupakan suatu proses, suatu system dan suatu perubahan. Sebagai suatu proses, pembelajaran merupakan proses interaksi yang terencana, terarah, dan berkelanjutan terhadap semua aspek pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Sebagai suatu system, pembelajaran merupakan suatu system yang saling berkaitan

antara satu system dengan yang lainnya agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Sebagai suatu perubahan, pembelajaran diharapkan dapat membawa perubahan pada peserta didik terutama pada aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya [2].

Perubahan ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif pada peserta didik adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk dikembangkan agar peserta didik mampu menghadapi kemajuan zaman dan teknologi yang terus berkembang. Terlebih pada *era society 5.0* peserta didik dituntut untuk dapat mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan social dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industry 4.0. Permasalahan social erat kaitannya dengan pembelajaran PPKn, yang mana tujuan dari pembelajaran PPKn yaitu terwujudnya kebajikan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*) pada diri setiap warga negara Indonesia [3]. Pengembangan *civic virtue* ini perlu didukung dengan mengembangkan elemen-elemen lainnya seperti pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic*

confidence), dan kecapakan kewarganegaraan (*civic competence*).

Pengembangan dimensi *Civic Virtue* merupakan dasar pengembangan partisipasi warga negara sebagai tujuan utama warga negara yang baik dan cerdas [4]. Dengan demikian pembelajaran PPKn sangat penting untuk diajarkan kepada setiap warga negara [5]. Selain itu, pembelajaran PPKn juga perlu untuk ditingkatkan lagi sebagai upaya untuk menghadapi *era society 5.0*. Dikarenakan pembelajaran PPKn tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengajarkan bagaimana mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan social, serta mengajarkan bagaimana mengembangkan diri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian [6]. Data-data yang diperlukan dalam metode penelitian ini yaitu berupa buku referensi, buku teks, karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal, prosiding, majalah dan sumber-sumber lain yang mendukung.

Pembahasan

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan generasi penerus warga negara yang memiliki pemikiran tajam dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, serta mempersiapkan warga negara menjadi warga dunia yang cerdas [7]. Oleh karena itu tujuan PPKn adalah menjadi warga negara yang cerdas dan baik, yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya kepekaan, daya tanggap, kritisasi, dan kreativitas sosial melalui peran pendidikan termasuk pendidikan di sekolah, proses belajar mengajar di kelas. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya harus menumbuhkan pemahaman atau pengetahuan (*civic knowledge*), tetapi juga menumbuhkan pemikiran kritis (*civic skills*) dan mampu

berpartisipasi dengan baik (*civic participation*) di masyarakat. Terlebih pada era transformasi yang terus berkembang hingga saat ini.

Perkembangan informasi, teknologi, dan dunia digital sangat mempengaruhi proses pembelajaran PPKn di kelas. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua perhatian penting. Pertama, peserta didik harus memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar dan masyarakat. Kedua, memasuki era modern, peserta didik harus mampu membekali diri melalui proses belajar, interaksi, kontak, dan komunikasi serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin ketat. Hal tersebut perlu dikembangkan dalam diri peserta didik sebagai pemecah masalah di lingkungan sekitar [8].

Civic Virtue

Civic virtue merupakan suatu hubungan antara warga dan negara, dan antara warga dengan komunitas yang ada didalamnya. *Civic virtue* ialah sikap atau perilaku warga negara yang mendahulukan kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadi dalam suatu komunitas. *Civic virtue* terdiri atas dua komponen yaitu *civic disposition* dan *civic commitment* [9]. Dengan adanya *civic virtue* menjadi penting untuk menunjang terciptanya suatu negara demokrasi dengan kehidupan yang demokratis. Fokus utama *civic virtue* yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Menurut sudut pandang *civic virtue* warga negara harus ikut terlibat dalam sudut pandang politik dalam memahami bahwa negara yang berperan aktif harus mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Adapun elemen-elemen *civic virtue* ialah *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skill*, *civic commitment*, *civic confidence* dan *civic competence*.

Civic Knowledge merupakan pengetahuan kewarganegaraan yang berkaitan dengan pengetahuan yang diketahui oleh warga negara ([10]. *Civic knowledge* memuat materi tentang kewarganegaraan yang berupa kumpulan dari pengetahuan, sikap serta keterampilan yang harus dipelajari peserta didik dalam membentuk sikap dan membantu

tercapainya kompetensi serta tujuan pembelajaran [11].

Civic Disposition (Watak Kewarganegaraan) merupakan hal penting untuk memelihara dan mengembangkan demokrasi yang mencakup tentang karakter publik maupun karakter privat. Watak warga negara mencakup tentang bagaimana warga negara berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami dari rumah, sekolah, komunitas, serta organisasi civic society. Karakter privat bertanggung jawab atas moral, disiplin dan harga martabat manusia dari setiap individu. Mengindahkan dan menguatkan aturan main dari rule of law, berpikir secara kritis kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain, serta dapat bernegosiasi dalam komunitas itulah karakter yang sangat dibutuhkan agar demokrasi berjalan dengan sukses dan baik [12].

Civic Skill (Keterampilan Kewarganegaraan) merupakan keterampilan yang luas dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang didapat menjadi bermakna serta dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skill memuat intellectual skills atau keterampilan intelektual dan keterampilan partisipan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan warga negara yang memiliki wawasan yang luas, efektif dan rasa bertanggung jawab serta dapat berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Keterampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menganalisis, menjelaskan, mengemukakan, mengevaluasi serta mempertahankan masalah yang berkaitan dengan masalah publik [13].

Civic Commitment merupakan kewajiban warga negara yang memiliki rasa ingin tau dan rasa sadar terhadap nilai serta prinsip demokrasi. Kesiediaan warga negara dalam mengikat diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta prinsip dalam nilai fundamental demokrasi.

Civic commitment terbentuk dari 2 element *civic culture* yaitu, Civic skill dan civic disposition. Civic skill yaitu keterampilan dan *civic disposition* yaitu watak dan terbentuklah commitment yang siap serta sadar dalam melihat nilai dan prinsip demokrasi [14].

Civic Confidence adalah kemampuan warga negara dalam lingkup atau kemampuan dalam aspek kompetensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa civic confidence yaitu kemampuan warga negara yang memiliki kepercayaan diri dan mengetahui pengetahuan yang baik dan luas. *Civic confident* yaitu dari 2 elemen *civic culture* yaitu *civic knowledge* dan *civic disposition* yang merupakan kemampuan warga negara dalam menentukan agar warga negara percaya diri dalam mengambil keputusan tersebut [15].

Civic Competence dapat meningkatkan peserta didik yang berilmu, bermoral dan berakhlak untuk terciptanya suatu negara. *Civic competence* harus dapat ditanam pada diri peserta didik karena dapat meningkatnya suatu perilaku yang baik yang dapat diharapkan. Adanya *civic competence* berasal dari dua elemen *civic culture* yaitu *civic knowledge* dan *civic skill*. Dengan adanya *civic competence* diharapkan warga negara memiliki *attitude* dan *value* [16]. Selain itu, *tujuan civic competence* yaitu untuk membentuk peserta didik dalam bersaing, memiliki etika, bermoral, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat yang lebih baik [17].

Era Society 5.0

Munculnya *Era Society 5.0* pertama kali di Jepang merupakan bentuk inisiatif politik strategis nasional. *Society 5.0* ini berupaya menciptakan nilai baru dan bekerjasama dengan beberapa sistem yang berbeda, kemudian merencanakan standarisasi format data, model, arsitektur sistem serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan. Selain itu, terdapat juga peningkatan pengembangan intelektual, standarisasi internasional, teknologi

pembatasan sistem *Internet of Things* (IoT), teknologi analisis data besar, teknologi kecerdasan buatan dan lain-lain. Hal tersebut Jepang diharapkan mampu mendorong daya saing dalam masyarakat super cerdas [18]. Skema dasar *Society 5.0* adalah bahwa data dikumpulkan dari dunia nyata dan di proses oleh komputer, dengan hasilnya diterapkan di dunia nyata. *Society 5.0* memiliki system yang dapat beroperasi secara terpadu dan bertujuan untuk menjamin kebahagiaan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Seperti kenyamanan dalam bidang energi, transportasi, perawatan medis, belanja, pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi [19].

Era Society 5.0 diartikan sebagai masyarakat yang berorientasi pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan pemecahan masalah sosial melalui integrasi ruang virtual dan ruang fisik. Jika pada di era revolusi industri 4.0 menciptakan layanan nilai baru yang membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, maka pada *Era Society 5.0* mereka telah mencapai tingkat integrasi yang lebih tinggi antara ruang maya dan ruang nyata. Oleh karena itu, dalam menghadapi *Era Society 5.0* menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa [27]. Terdapat dua faktor dalam mencapai cita-cita tersebut, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan digunakan sebagai sarana mempersiapkan dari segi kecerdasan atau intelektual, dan kebudayaan digunakan sebagai sarana penguatan "*soft skill*" guna membentuk manusia yang unggul dalam menghadapi *Era Society 5.0* [20].

Pentingnya Penguatan *Civic Virtue* Pada Pembelajaran PPKn dalam Menghadapi Era Society 5.0

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *civic virtue* merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dari pembelajaran PPKn. Hal ini sejalan dengan *era society 5.0* yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memasukkan *revolusi industry 4.0* kedalam setiap industry dan kehidupan sosial [21]. Dengan demikian dibutuhkan adanya *civic knowledge, civic disposition, civic skill,*

civic commitment, civic confidence, dan *civic competence* yang terangkum di dalam *civic virtue* untuk menghadapi *era society 5.0*. *Civic knowledge* (Pengetahuan kewarganegaraan) merupakan kemampuan keilmuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, di era *society 5.0* ini warga negara dituntut untuk mengetahui segala hal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara juga segala perkembangan yang dapat memengaruhi kehidupan tersebut.

Civic disposition (Sikap kewarganegaraan) merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, dimana pada *era society 5.0* ini warga negara dituntut untuk mampu mempertimbangkan suatu permasalahan sosial dalam segi moral, bertanggung jawab terhadap lingkungannya, kemampuan untuk memahami dan mempunyai sikap toleran terhadap pandangan yang berbeda serta yang tidak kalah penting adalah mempunyai sikap sopan santun dalam berinteraksi terutama dalam dunia yang serba digital ini. Selanjutnya adalah *Civic skill* (Keterampilan kewarganegaraan), hal ini berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis dan berpartisipasi [26]. Pada *era society 5.0* kemampuan berpikir kritis dan berpartisipasi menjadi sesuatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

Civic commitment (Komitmen kewarganegaraan) juga penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara di *era society 5.0* karena merupakan gabungan dari *civic disposition* dan *civic skill* yang akan menjadikan warga negara memiliki tanggung jawab terhadap segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Selain itu, untuk menghadapi *era society 5.0* dibutuhkan adanya kepercayaan diri pada setiap warga negara (*civic confidence*). Karena dengan adanya kerpercayaan diri maka setiap warga negara akan mau terus berusaha untuk mengembangkan kemampuannya (*civic competence*), seperti kemampuan berkomunikasi, menggunakan digital, kemampuan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dan lain sebagainya.

Berdasarkan kompetensi tersebut, maka perlu pembaharuan dalam pembelajaran PPKn guna membentuk *civic virtue* (keadaban warga negara) dalam menghadapi *society 5.0*. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, Pertama, dengan cara memperbaiki

infrastruktur. Pemerintah harus meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan koneksi internet ke seluruh wilayah agar proses pembelajaran yang serba digital bisa dilaksanakan dengan baik. Kedua, sumber daya manusia sebagai pengajar harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif terutama guru PPKn yang mempunyai tanggung jawab lebih untuk menciptakan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang baik. Ketiga, pemerintah harus mapu menyinkronkan antara pendidikan dan industri agar lulusan sekolah ataupun perguruan tinggi dapat bekerja sesuai dengan bidangnya atau sesuai kebutuhan industri guna menekan angka pengangguran di Indonesia [22].

Era society 5.0 dipenuhi dengan nuansa kompetensi dan perubahan yang begitu cepat, dalam hal pembelajaran diperlukan suatu bentuk pembelajaran guna membentuk kompetisi dan inovasi belajar yang dimiliki peserta didik, kemudian kecakapan menggunakan teknologi dan media informasi, serta menguasai berbagai kecakapan untuk bekerja dan bertahan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, perlu untuk selalu memperhatikan kemampuan generasi muda dalam berbagai bidang [25].

Suatu bentuk pembelajaran dalam menghadapi *Era Society 5.0* dapat mengacu pada pembelajaran yang diperkenalkan oleh komisi UNESCO dalam bentuk “*the four pillars of education* (empat pilar pendidikan)” yaitu bagaimana belajar untuk mengetahui sesuatu (*learning to do*), kemudian belajar bagaimana hidup bersama sebagai pedoman untuk ikut terlibat dan bekerjasama dengan masyarakat lain dalam semua kegiatandi lingkungan sekitar (*learning to life together*), dan bagaimana belajar memahami untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*).Oleh karena itu, tidak hanya fokus pada kognitif saja, tetapi mampu menerapkan pengetahuan dan sikap dalam kehidupan masyarakat. Itulah beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya penguatan *civic virtue* pada pembelajaran PPKn.

Kesimpulan

Memasuki *era society 5.0* peserta didik diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan sosial dengan cara memanfaatkan inovasi-inovasi yang lahir pada era *revolusi industry 4.0*. Oleh karena itu

penguatan *civic virtue* pada pembelajaran PPKn penting untuk dilakukan karena dapat dijadikan sebagai penopang untuk menghadapi *era society 5.0*. Melalui *civic virtue* peserta didik tidak hanya dibekali pengetahuan dasar-dasar berbangsa dan bernegara, tetapi juga diajarkan bagaimana sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta diajarkan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi sebagai penunjang dalam menghadapi perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- [1] Lestari, Sudasri. 2018. Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2(2), 94-100.
- [2] Suyahman. 2018. Implementasi Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Nilai Pancasila dalam Menghadapi Revolusi Industry 4.0 bagi Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2018-2019. *FKIP Univet Bantara Sukoharjo*, 67-83.
- [3] Winarno. 2019. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: panduan kuliah di perguruan tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Adha, M.M. 2019. Pengembangan Keadaban Kewarganegaraan Melalui Festival Krakatau. (Disertasi) Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- [5] Adha, M. M. dan Perdana, D. R. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [6] Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal.3.
- [7] Nurmalisa, Y., Mentari, A., Rohman. 2020. Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun *Civic Conscience*. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik PKn*. 7(1). 34-46
- [8] Adha, M.M., Ulpa, E.P., Yanzi, H. Nurmalisa, Y., Hidayat, O.T., Putri, D.S. Relevansi Pembelajaran Project Citizen “Memproduksi” Pengetahuan dan Keterampilan Pembelajar Masa Kini dan

- Masa Depan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung.
- [9] Quigley, C.N., & Bahmueller, C. F. 1991. *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- [10] Komalasari, K. 2011. Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan. *MIMBAR*, 47-55.
- [11] Gafur, A. 2012. *Desain pembelajaran: konsep, model, dan aplikasinya dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [12] Branson, M. S. (1999). *Belajar "Civic Education" dari Amerika* (Terjemahan Syarifudin dkk). Yogyakarta: LKIS.
- [13] Cholisin. 2005. *Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Dalam Praktik Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi*.
- [14] Quigley, C.N., & Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education. p.11.
- [15] Adnan, M. F. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) pada Era Demokratisasi. *Jurnal Demokrasi*, 7.
- [16] Banks, J., A. (1985). *Teaching Strategies for The Social Studies. Inquiry, Valuing, and Decision-Making*. Longman.
- [17] Adha, M. M. 2020. Pemahaman dan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Universitas Lampung
- [18] Hisasi, H., Sasajima, H., Takayanagi, Y., dan Kanamaru, H. 2017. International Standardization for Smarter Society in the Field of Measurement, Control and Automation. In *56th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE)*, 263-266.
- [19] Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., dan Tani, S. 2020. *What Is Society 5.0?*. The University of Tokyo, Japan: Springer Open.
- [20] Nastiti, F.E., Ni'mal 'Abdu, A.R. 2020. Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*. 5(1). 61-66.
- [21] Handayani, N. N. L. dan Muliastri, N. N. E. 2020. Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar). *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 1-14.
- [22] Sumarno. 2019. Pembelajaran Kompetensi Abad 21 Menghadapi Era Society 5.0. *Prosiding SEMDIKJAR: Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran*, 3. 272-287.
- [23] Adha, M. M. (2010). Model Project Citizen untuk meningkatkan kecakapan warga Negara pada konsep kemerdekaan mengemukakan pendapat. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(8), 44-52.
- [24] Abidin, R. F., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2015). *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa* (Doctoral dissertation, Lampung University).
- [25] Adha, M. M., Ulpa, E. P., Yanzi, H., Nuralisa, Y., Hidayat, O. T., & Putri, D. S. (2019). Relevansi Pembelajaran Project Citizen "Memproduksi" Pengetahuan dan Keterampilan Pembelajar Masa Kini dan Masa Depan.
- [26] Ikhtiarti, E., Adha, M. M., & Yanzi, H. 2019. Membangun Generasi Muda Smart And Good Citizenship Melalui Pembelajaran Ppkn Menghadapi Tantangan Revolusi Industri.
- [27] Hartino, A. T., & Adha, M. M. 2020. Optimalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Meningkatkan Civic Knowledge Peserta Didik Melalui Media Sosial. In *E Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2020*.